Jurnal Multidisiplin West Science
Vol. 04, No. 06, Juni 2025, pp. 592-602

Proyeksi Strategi Kebijakan Fiskal Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo Terhadap Kemandirian Ekonomi

Muhammad Asrul Maulana[1], Fajar Muharram[2]
[1] Universitas Airlangga dan muhammad.asrul.maulana-2024@fh.unair.ac.id
[2] Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan fajarmuharram@umsida.ac.id

ABSTRAK

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo. Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan laporan indeks daya beli masyarakat dan pelaku usaha/UMKM Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai variabel pendapatan dan daya beli masyarakat kepada Bupati Sidoarjo serta pihak-pihak terkait. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai dan berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan bagi Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Laporan indeks daya beli masyarakat dan pelaku usaha/UMKM untuk tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan berbagai variabel, yaitu harga, kualitas produk, lokasi, dan pendapatan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menghitung hubungan antara harga produk, kualitas produk, lokasi, dan pendapatan terhadap indeks daya beli masyarakat (DBM) dengan penentuan kebijakan fiskal Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: *Proyeksi, Kebijakan Fiskal, Desa Wisata, UMKM, Ekonomi, Kabupaten Sidoarjo*

ABSTRACT

Regional Development Planning, Research, and Development Agency (Bappeda) of Sidoarjo Regency. Reporting of government performance through the preparation of the report on the purchasing power index of the community and business actors/UMKM of the Sepande 1000 UMKM Tourism Village, Sidoarjo Regency by the Regional Development Planning, Research, and Development Agency (Bappeda) of Sidoarjo Regency aims to convey information on the variables of income and purchasing power of the community to the Regent of Sidoarjo and related parties. This report is expected to provide an overview of the performance results that have been achieved and serve as a basis for improvement for the Sidoarjo Regency Bappeda. The report on the purchasing power index of the community and business actors/UMKM for 2025 is prepared by considering various variables, namely price, product quality, location, and income. Hypothesis testing is carried out by calculating the relationship between product price, product quality, location, and income to the community purchasing power index (DBM) with the determination of fiscal policy for the Sepande 1000 UMKM Tourism Village, Sidoarjo Regency.

Keywords: *Projections, Fiscal Policy, Tourism Villages, MSMEs, Economy, Sidoarjo Regency*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari kuesioner mengenai pengaruh daya beli masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Untuk variabel pendapatan, indikator yang paling berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah jenis pekerjaan, dengan nilai pengaruh sebesar 75%. Sementara itu, indikator yang paling kurang berpengaruh adalah biaya ditanggung, dengan nilai sebesar 5%; (b) Untuk variabel harga produk, indikator yang paling berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah daya saing harga dibandingkan produk sejenis, dengan nilai 40%. Sebaliknya, indikator yang paling kurang berpengaruh adalah merek produk, dengan nilai 10%; (c) Untuk variabel lokasi, indikator yang paling berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah lingkungan, dengan nilai 65%.

Sebaliknya, indikator yang paling kurang berpengaruh adalah visibilitas (lokasi yang terlihat jelas dari jarak pandang normal), dengan nilai 10%. Komoditas yang penting untuk meningkatkan indeks daya beli masyarakat melibatkan sektor kebutuhan, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.

[Hasil Kusioner Mengenai Pengaruh Daya Beli Masyarakat]

Variabel Pendapatan	Persentase
Pekerjaan	75
Biaya Lainya	20
Ditanggung	5
Variabel Produk	Persentase
Daya Saing Harga	40
Legalitas Usaha	25
Merek Produk	10
Ketahanan Produk	25
Variabel Lokasi	Persentase
Lingkungan	65
Visibilitas	10
Akses Jalan	25

Created with Datawrapper

Gambar 1. Hasil Kuesioner Mengenai Pengaruh Daya Beli Masyarakat

Data dari kuesioner mengenai sektor dan subsektor yang penting bagi daya beli masyarakat menunjukkan hal berikut: (a) Untuk sektor kebutuhan indikator yang paling berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah makanan, dengan nilai pengaruh sebesar 65%, Sebaliknya, indikator yang paling kurang berpengaruh adalah jasa, dengan nilai 5%. Melihat data tersebut, masyarakat Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo dalam sektor kebutuhan lebih memilih kepada sub sektor makanan daripada jasa, sehingga makanan mempunyai nilai sangat penting sekali terhadap daya beli masyarakat, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.

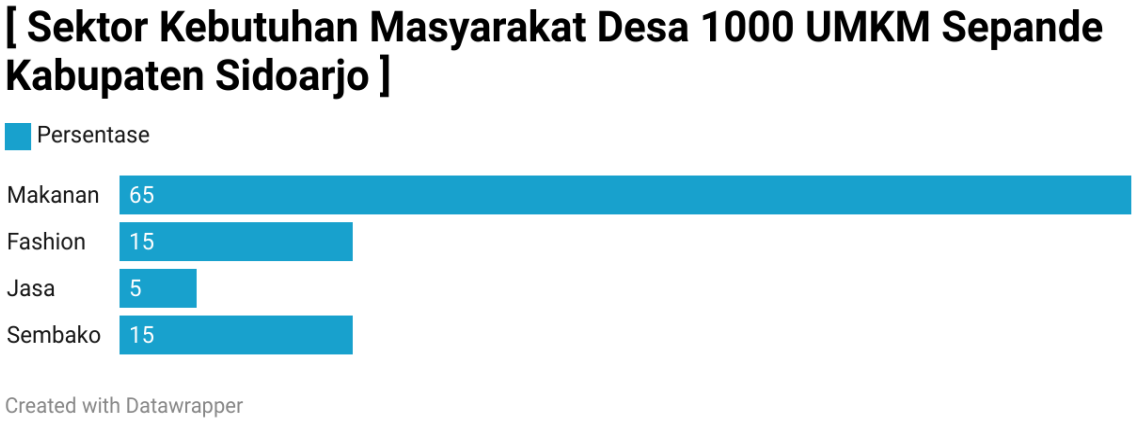

Gambar 2. Sektor Kebutuhan Masyarakat Desa 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap data dan masalah yang terkait dengan setiap sasaran mengidentifikasi beberapa tantangan dan area perbaikan yang perlu diperhatikan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo ke depan. Masih ada sejumlah masalah di masyarakat yang belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi terkait serta mitra kerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo, baik dari sektor instansi maupun masyarakat setempat. Dengan demikian, upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan indeks daya beli masyarakat dan pelaku usaha/UMKM Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan secara optimal (Muhammad Asrul Maulana, Dwi Nadhiro Salsabila Azizah, and R. O. . Nanda 2023).

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Manusia

Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, telah mengadopsi konsep "*Pembangunan Manusia*" dalam paradigma pembangunan mereka. Paradigma ini menjadi dasar bagi upaya peningkatan kualitas pembangunan yang fokus pada kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Gebremichael et al. 2022).

Seiring waktu, terjadi pergeseran dalam paradigma pembangunan. Pertama, dimulai dengan paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*). Kedua, beralih ke paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*). Ketiga, adalah paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development paradigm*).

Dalam diskursus pembangunan manusia, pembangunan manusia dianggap sebagai tujuan utama dan akhir dari proses pembangunan. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai "proses untuk memperluas pilihan yang dimiliki oleh manusia" (Aqdami 2021).

Paradigma pembangunan manusia menekankan bahwa pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari hasil agregat di tingkat makro, seperti produk domestik bruto. Kemajuan dalam pembangunan manusia lebih terlihat dari perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti durasi hidup yang lebih panjang, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, serta standar hidup yang layak.

Aspek-aspek seperti kebebasan politik dan harga diri juga menjadi indikator penting. Dengan demikian, pencapaian-pencapaian ini berkontribusi pada pemenuhan hidup yang lebih lengkap, produktif, dan kesejahteraan manusia. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan gabungan dari indikator pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan daya beli (*Purchasing Power Parity*) (Harman, Rahman, and Sudirman 2022).

Meskipun IPM atau *Human Development Index* (HDI) bukan satu-satunya alat ukur untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, keempat indikator yang digunakan dalam IPM diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menilai bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan IPM bukan hanya bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi yang solid di Kabupaten Sidoarjo, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kelangsungan hidup demokrasi di wilayah tersebut (Indriya Purwaningsih, et al. 2022).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren perlambatan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,51 persen dan meningkat menjadi 5,8 persen pada tahun 2017. Tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan angka 6,02 persen. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan sedikit menjadi 5,99 persen. Tahun 2020 mencatatkan penurunan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai minus 3,69 persen. Meski demikian, tahun 2021 menunjukkan pemulihan yang cukup pesat, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat dari minus 3,69 % menjadi 4,21 persen, mencatat kenaikan sebesar 80 % (Maulana 2023).

Kajian dan analisis indeks daya beli masyarakat serta pelaku usaha/UMKM di Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo dilakukan untuk memperoleh pemahaman sebagai berikut: (a) kondisi ekonomi masyarakat, termasuk pendapatan rata-rata dan tingkat konsumsi; (b) perkembangan sektor-sektor perekonomian masyarakat, termasuk kebijakan sektoral, kontribusi sektor ekonomi, dan produktivitas sektoral; (c) pertumbuhan ekonomi secara makro, meliputi laju pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto; dan (d) sebagai dasar dalam penyusunan alat kebijakan oleh Bappeda, dengan melakukan sinergi program bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra dinas Kabupaten Sidoarjo (Indriya Purwaningsih, et al. 2022).

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi negara yang dijalankan oleh pemerintah melalui pengaturan penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) negara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga. Menurut Richard A. Musgrave, kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi untuk penyediaan barang dan jasa publik, fungsi distribusi untuk menciptakan keadilan sosial melalui pajak dan subsidi, serta fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dari fluktuasi siklus ekonomi. Kebijakan fiskal dijalankan melalui dua instrumen utama, yaitu penerimaan negara yang meliputi pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pengeluaran negara yang mencakup belanja pemerintah untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Berdasarkan tujuannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif yang digunakan pada saat resesi untuk meningkatkan

pengeluaran dan menurunkan pajak guna merangsang pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan fiskal kontraktif yang digunakan untuk menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak. Secara teoritis, kebijakan fiskal mendapat landasan dari berbagai pendekatan, seperti teori Keynesian yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur permintaan agregat melalui belanja negara, teori klasik yang menolak intervensi pemerintah dengan keyakinan bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara alami, dan teori Ricardian Equivalence yang menyatakan bahwa pembiayaan defisit melalui utang tidak efektif karena masyarakat akan mengantisipasi pajak di masa depan dan mengurangi konsumsi. Di Indonesia, kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan dijabarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi alat penting untuk mengarahkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan..

C. Desa Wisata

Proyeksi strategi kebijakan fiskal di Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal melalui optimalisasi potensi fiskal daerah dan sinergi lintas sektor. Kebijakan fiskal ini dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran yang berpihak pada pengembangan UMKM berbasis pariwisata, seperti pemberian insentif pajak daerah bagi pelaku usaha kecil, subsidi pelatihan kewirausahaan, serta dukungan modal usaha berbasis program Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Desa. Selain itu, peningkatan belanja daerah untuk infrastruktur pendukung wisata seperti jalan, akses digital, dan fasilitas publik juga menjadi elemen strategis dalam membangun ekosistem desa wisata yang berdaya saing. Strategi fiskal juga perlu memperkuat kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, serta pelaku usaha lokal untuk menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan fiskal yang partisipatif dan berbasis potensi lokal, Desa Wisata 1000 UMKM Sepande dapat menjadi model pembangunan ekonomi desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan. Kemandirian ekonomi yang dicapai dari kebijakan fiskal ini tidak hanya menciptakan nilai tambah lokal, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa terhadap gejolak ekonomi nasional dan global.

D. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi UMKM merujuk pada kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan eksternal, baik dari pemerintah maupun

pihak swasta. Kemandirian ini mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan, mengelola usaha secara profesional, memanfaatkan sumber daya lokal, serta berinovasi dalam menghadapi dinamika pasar. UMKM yang mandiri memiliki ciri-ciri antara lain kapasitas produksi dan manajemen usaha yang stabil dengan sistem pencatatan keuangan yang rapi dan akuntabel, akses terhadap modal yang sehat baik melalui permodalan mandiri, koperasi, maupun lembaga keuangan formal seperti bank atau fintech, kemampuan dalam melakukan inovasi produk dan pemasaran termasuk pemanfaatan teknologi digital dan *e-commerce*,

Jaringan kemitraan usaha yang luas baik dengan sesama pelaku UMKM maupun sektor swasta, BUMDes, dan pemerintah, serta kemandirian dalam menyerap dan mengembangkan tenaga kerja lokal sehingga berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Desa Wisata 1000 UMKM Sepande Kabupaten Sidoarjo, kemandirian ekonomi UMKM ditunjukkan melalui keberhasilan pelaku usaha lokal dalam mengintegrasikan produk UMKM dengan aktivitas pariwisata seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan homestay. Upaya ini diperkuat dengan adanya program pelatihan, pembinaan usaha, serta dukungan kebijakan fiskal daerah yang responsif terhadap kebutuhan UMKM. Dengan demikian, kemandirian ekonomi UMKM menjadi fondasi penting dalam menciptakan desa wisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal reaserch*, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dinamika pembangunan manusia dan kondisi ekonomi masyarakat di Desa Wisata 1000 UMKM Sepande, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai realitas sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat lokal. Lokasi penelitian adalah Desa Wisata 1000 UMKM Sepande, Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian diarahkan pada: Kondisi ekonomi masyarakat, termasuk daya beli, pendapatan, dan konsumsi. Peran UMKM dalam menunjang pembangunan ekonomi lokal. Kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan manusia dan sinergi antar-OPD.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti: Pelaku UMKM di Desa Sepande. Aparat desa dan pengurus BUMDes. Perwakilan dari Bappeda Sidoarjo dan OPD terkait. Data sekunder, diperoleh dari: Dokumen resmi pemerintah (misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Statistik IPM dan pertumbuhan ekonomi dari BPS Kabupaten Sidoarjo. Literatur dan hasil penelitian sebelumnya (UNDP, jurnal ilmiah, dan buku.). Teknik Pengumpulan Data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali perspektif pelaku UMKM dan pemangku kebijakan. Observasi partisipatif, untuk mengamati langsung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Desa Sepande. Studi dokumentasi, berupa telaah terhadap data IPM, laporan Bappeda, serta kebijakan dan program daerah. Teknik Analisis Data Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap

utama: Reduksi data proses memilah dan merangkum data yang relevan. Penyajian data – menyusun informasi dalam bentuk naratif, matriks, atau tabel tematik. Penarikan kesimpulan/verifikasi mengidentifikasi pola, hubungan kausal, dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kebijakan Desa Wisata 1000 UMKM Sepande

Berdasarkan kajian dan analisis indeks daya beli masyarakat serta wawancara dengan masyarakat dan pelaku usaha, sejumlah rekomendasi teknis untuk meningkatkan indeks daya beli masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Pembagian analisis Kemandirian Ekonomi & Pelaku Usaha/UMKM

No	Aspek	Indikator	Organisasi Perangkat Daerah Terkait
1	Finansial	Permodalan berbasis Crowdfunding (urun dana) dengan bunga rendah bagi UMKM	Bank yang berafiliasi dengan Pemerintah Daerah; Dinas KUMKM
		Peningkatan alokasi APBD untuk bidang ekonomi	
		Kemudahan akses pembiayaan melalui skema yang pro Usaha Mikro Kecil Menengah, Usaha Kecil Menengah, dan Industri Kecil Menengah	
2	Infrastruktur	Program pembangunan instrukstur Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo	Dinas PUPR, Dinas Kemudaan dan Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kominfo
		Ketersediaan inkubator bisnis bagi pelaku usaha (Tempat Wisata)	
3	Sumber daya manusia (SDM)	Membuka banyak lapangan kerja baru	Dinas KUMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan
		Pelatihan ketrampilan dan wirausaha	
		Meningkatan kesempatan kerja	
		Adanya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha (UKM, IKM, UMKM)	
4	Kebijakan	Adanya integrase kebijakan kependudukan dan kebijakan ekonomi daerah melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo	BAPPEDA Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		Adanya dukungan dan komitmen Pemenrintah Daerah untuk pro UMKM, UKM dan IKM. Melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo	
		Adanya kebijakan kemitraan antar pelaku usaha	
5	Tata Kelola Usaha	Adanya standar produk	Dinas KUMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informasi
		Pendampingan Legalitas Usaha	
		Pendampingan Legalitas Produk	
		Pendampingan strategi pemasaran	

		Pendampingan digitalisasi bisnis	
		Perluasan pasar	
		Adanya sistem informasi terintegrasi terkait pelaku usaha, ketersediaan produk dan harga produk	
6	Informasi dan Komunikasi	Adanya kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha	Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas KUMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan
		Adanya kemudahan akses informasi dan komunikasi ketersediaan harga produk	
		Adanya kemudahan akses informasi dan komunukasi ketersediaan produk	
		Pengawasan dan Pembinaan	
		Adanya kemudahan akses informasi terkait informasi produk	

Berdasarkan tabel di atas, Bappeda Kabupaten Sidoarjo perlu mengambil beberapa langkah, termasuk melakukan sinergi program dengan dinas terkait serta mitra kerja dari unsur masyarakat. Langkah-langkah tersebut meliputi. Dalam aspek finansial, Bappeda dapat melakukan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo, dengan mengimplementasikan kebijakan hukum untuk menyediakan pinjaman berbunga rendah melalui Bank Jatim, sebagai mitra pemerintah daerah. Ini bertujuan agar akses pembiayaan untuk UMKM, UKM, dan IKM dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, Bappeda dapat mengusulkan peningkatan alokasi APBD untuk sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Program Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn, yang bertujuan menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia, mendukung langkah ini. Untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat UMKM Indonesia secara efektif, pendanaan juga dapat dipertimbangkan melalui crowdfunding sebagai bentuk kemandirian finansial (Arisanti and Oktavendi 2022).

Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar 300 miliar rupiah untuk proyek betonisasi jalan. Diharapkan, proyek betonisasi ini akan mendorong kemajuan industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk memaksimalkan dampak proyek ini, Bappeda perlu bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Kominfo. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan dan mendukung inkubator bisnis di tingkat desa melalui pelatihan dan program yang relevan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan industri kreatif dan UMKM dapat berkembang pesat. Hal ini akan berkontribusi pada penciptaan iklim bisnis dan ekonomi yang dinamis serta membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo secara bertahap.(Admiral et al. 2024)

Mereformasi Peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) di Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan UMKM di antaranya: PERBUP Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, PERBUP Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Pelaku Usaha Mikro, PERBUP Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi.

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu pusat industrialisasi utama di Jawa Timur, yang terlihat dari tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) di daerah ini. Untuk menanggulangi pengangguran, Pemkab Sidoarjo dapat menerapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan Bupati Sidoarjo menerapkan pembinaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo mengenai persentase UMKM. Contohnya, 35% dari UMKM di bidang Jasa yang memiliki KTP Sidoarjo, sedangkan 60% dari UMKM di bidang barang memiliki KTP Sidoarjo, dan 5% UMKM Luat KTP Sidoarjo, untuk dapat berjualan di Lokasi Desa Wisata 1000 UMKM. Langkah ini bisa diterapkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan, dan diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo berada pada angka 8,8%, yang menurun 23,52% dibandingkan tahun 2021. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kemudahan dan bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM, serta pelatihan kerja yang diadakan di setiap kecamatan. Dengan menerapkan regulasi mengenai persentase pelaku usaha, pengangguran dapat diturunkan secara lebih efektif. Jika angka pengangguran dapat dikurangi, maka tingkat kriminalitas akan menurun, indeks kebahagiaan masyarakat akan meningkat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak juga dapat meningkat (R. R. Phahlevi et al. 2024).

Selain itu, Pemkab Sidoarjo harus memahami bahwa tidak semua warga ingin menjadi pekerja. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan pelatihan keterampilan dan wirausaha serta memberikan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha (UKM, IKM, UMKM). Ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan dengan berbagai program pemberdayaan untuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Anggraini et al. 2024).

Bappeda perlu bekerja sama dengan Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan untuk mengoptimalkan program-program daerah yang sudah ada. Ini termasuk program seperti Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat Daerah Sidoarjo Yang Gemilang), yang menawarkan kredit modal dengan bunga rendah 3% per tahun untuk ribuan UMKM di Sidoarjo, bantuan modal usaha untuk kelompok usaha perempuan (Kurma), serta fasilitasi pengurusan izin usaha NIB untuk ratusan UMKM agar bisa naik kelas. Selain itu, Bappeda juga harus mendukung upaya Pemkab untuk menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia, agar Kabupaten Sidoarjo bisa menjadi pusat UMKM nasional (Ardiansyah and Purwaningsih 2024).

Dengan kata lain, program dan kegiatan yang mendukung pengembangan dan pendampingan pelaku UMKM harus berjalan dengan efektif. Ini mencakup pendampingan dalam hal legalitas usaha dan produk, penetapan standar produk, strategi pemasaran, digitalisasi bisnis, serta perluasan pasar.

B. Hubungan Sebab Akibat Kebijakan Dalam Perspektif Fiskal

Dalam perspektif fiskal, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki keterkaitan sebab-akibat yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada aktivitas ekonomi pelaku UMKM, tetapi juga memicu efek berantai yang memperkuat struktur ekonomi lokal (Adiyanta 2020).

Pertumbuhan UMKM mendorong peningkatan berbagai jenis penerimaan daerah, seperti pajak restoran, pajak reklame, serta retribusi atas pemanfaatan fasilitas umum (Maulana and

Avrillina 2024) Semakin berkembangnya UMKM juga mempercepat sirkulasi uang di masyarakat, yang berimplikasi pada peningkatan konsumsi dan daya beli lokal. Dalam jangka panjang, perputaran ekonomi ini menggerakkan sektor-sektor pendukung lainnya, termasuk pariwisata dan perdagangan. Selain memberikan kontribusi pada sisi penerimaan, UMKM berperan penting dalam aspek sosial ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja lokal dan penurunan angka pengangguran serta kemiskinan. Hal ini akan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, skema hubungan sebab-akibat dari kebijakan penguatan UMKM menunjukkan bahwa investasi dalam sektor ini memberikan dampak fiskal positif yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah, seperti Gambar 3.

Gambar 3. Skema Hubungan Sebab Akibat Dilaksanakan Kebijakan

UMKM yang berjalan dengan lancar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan UMKM mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, seperti pajak restoran, pajak reklame, dan retribusi fasilitas umum yang digunakan oleh pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan UMKM yang berkembang menciptakan perputaran uang yang lebih cepat di masyarakat, meningkatkan daya beli lokal, dan secara tidak langsung memperkuat perekonomian daerah. Produk unggulan UMKM juga mampu menarik wisatawan, yang turut mendorong sektor pariwisata daerah dan menciptakan pendapatan tambahan. Dengan menyerap tenaga kerja lokal, UMKM tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

KESIMPULAN

Penerapan Kebijakan Desa Wisata 1000 UMKM di Sepande menunjukkan adanya pendekatan multidimensional yang mencakup aspek finansial, infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan, tata kelola usaha, serta informasi dan komunikasi. Setiap aspek ini melibatkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Kolaborasi antara Bappeda dan dinas terkait terbukti penting untuk mendorong realisasi pembiayaan pro-UMKM, pembentukan inkubator bisnis, serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Sinergi kebijakan ini semakin diperkuat dengan dukungan regulasi daerah yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dampak fiskal dari penguatan UMKM sangat signifikan. Melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, serta pertumbuhan sektor penunjang seperti pariwisata dan perdagangan, keberadaan UMKM mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, UMKM berperan sebagai penggerak utama dalam membangun struktur ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

REFERENSI

Adiyanta, Fc Susila. 2020. "Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19." *Administrative Law and Governance Journal* 3 (1): 162–81. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181.

Admiral, Admiral, Imam Riauan, Suparto Suparto, Puti Mayang Seruni, Monika Melina, and Naurah Dwirengganis Riata Putri. 2024. "Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berwawasan Hukum Di Kota Pekanbaru." *I-Com: Indonesian Community Journal* 4 (1): 81–89. https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.3887.

Anggraini, Ayu, Fadila Rahmadani Safitri, Amirrul Shihab, Danda Febrizal, and Vivi Nila Sari. 2024. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Motivasi Kerja UMKM Frozen Food." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2 (5): 1669–73. https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1088.

Aqdami, Rizki Kurnia. 2021. "Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi, Komitmen Organisasi, Dan Spiritualitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Sebagai Variabel Intervening Pada Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga." *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)* 5 (1): 183–94. https://doi.org/10.32493/jjsdm.v5i1.13154.

Ardiansyah, Muhammad, and Sri Budi Purwaningsih. 2024. "Prosedur Perizinan UMKM Sebagai Inti-Plasma Pada Usaha Besar." *Deleted Journal* 1 (3): 12–12.

Arisanti, Ike, and Tri Wahyu Oktavendi. 2022. "Analyzing the Determining Factors of Funding Speed on Equity Crowdfunding." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, December, 111–18. https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art1.

Gebremichael, Bereket, Alemayehu Hailu, Mekitew Letebo, Etsub Berhanesilassie, Arega Shumetie, and Sibhatu Biadgilign. 2022. "Impact of Good Governance, Economic Growth and Universal Health Coverage on COVID-19 Infection and Case Fatality Rates in Africa." *Health Research Policy and Systems* 20 (1): 130-. https://doi.org/10.1186/s12961-022-00932-0.

Harman, Harman, Abdul Rahman, and Sudirman Sudirman. 2022. "Efek Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi." *KINERJA* 19 (2): 268–76. https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.11174.

Indriya Purwaningsih, Meutia Auliya Rahma, Achmad Alfarel Nuzul Ghozali, and Grujs farhan Nafis. 2022. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2022/02/25/1f1cf9632618622ce400d84a/kabupaten-sidoarjo-dalam-angka-2022.html.

Maulana, Muhammad Asrul. 2023. "Potensi Negara G20 Sebagai Solusi Penumpas Persampahan Kabupaten Sidoarjo Untuk Mendukung Laju Ekonomi." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 11 (2): 204–14. https://doi.org/10.14710/jwl.11.2.204-214.

Maulana, Muhammad Asrul, and Java Putri Avrillina. 2024. "Kesehatan Sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis Tentang Hukum Kesehatan." *Journal of Contemporary Law Studies* 2 (1): 42–54. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2075.

Muhammad Asrul Maulana, Dwi Nadhiro Salsabila Azizah, and R. O. . Nanda. 2023. "Improving the UMKM Economy through Business Legality Strategies." *SN-IMEKB* 2 (2): 187–200.

R. R. Phahlevi, S. B. Purwaningsih, I. U. Choiriyah, Moh. Faizin, Maulana M. A, and A. B. Prasetyo. 2024. "Legalitas BUMDesa : Pendampingan BUMDesa Lemujud Dalam Pemenuhan Good Corporate Governance." *J. Dedik. Huk* 4 (1): 12–24.